

Kebijakan Politik Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Aceh

Jihan Fahira

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Email: fahiraj254@gmail.com

ABSTRAK

Aceh merupakan sebuah provinsi yang terletak di ujung barat pulau sumatera. Sebelum menjadi keraajan Aceh yang berdaulat, Aceh memiliki sejarah yang cukup panjang yang diabadikan dalam buku buku beserjarah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan peninggalan masa lalu yang tertulis dalam buku sejarah. Aceh memulai masa kejayaannya pada abad ke-13 Masehi. Kolonial Belanda memiliki keinginan untuk masuk menduduki Aceh pada abad ke-19 Masehi, mereka ingin menaklukkan Aceh yang dilatar belakangi oleh kekayaan sumber daya alam. Namun, mereka ingin menanamkan kebijakan-kebijakan politik kolonial Belanda di Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan Belanda dalam menaklukkan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode Library Research dengan pendekatan heuristik. Adapun cara data yang ditemukan akan dikumpulkan lalu dianalisis menjadi data yang relevan sesuai dengan topik penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa peristiwa kebijakan politik kolonial Belanda di masa lalu. Melalui penelitian ini diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Aceh itu sangat hebat. Terbukti dari Aceh sanggup melawan Belanda melalui perang Aceh dan kebijakan-kebijakan yang ditanamkan oleh Belanda kepada Aceh mampu dilawan serta diperjuangan oleh kerajaan Aceh khususnya masyarakat Aceh yang ada dimasa itu. Oleh karena itu, Belanda tidak bisa menaklukkan Aceh karena tangguhanya kerajaan Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh.

Kata kunci: Aceh, Kolonial Belanda, Kebijakan Politik

Pendahuluan

Kolonialisme adalah sebuah paham kekuatan politik ke luar wilayah yang sah untuk menguasai wilayah lain. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan suatu negara untuk menjadikan bangsa yang terkuat, mencari sumber kekayaan alam, serta ingin menyebarkan agama dan ideologinya. Tetapi hak, kewenangan, serta kewajiban mereka di pantau oleh negara asalnya sebagai pusat pemerintahan. Ada beberapa negara yang terlibat dalam kolonialisme yaitu Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang (Miftakhuddin, 2019).

Masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke 7M. Kolonialisme di Indonesia dimulai sekitaran akhir abad ke 16 dan awal abad ke 17 dengan ketadangan bangsa Belanda. Mereka ingin menguasai Indonesia yang dilatarbelakangi oleh perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala,

serta mendirikan koloni untuk eksploitasi sumber daya alam. Proses kolonialisme ini berlangsung selama berabad-abad, dan juga bangsa Belanda menciptakan dampak budaya, ekonomi, dan sosial yang mendalam di Indonesia (Mustofa, 1999).

Sistem politik kolonial Belanda di Aceh mempengaruhi pembentukan struktur administrasi yang memungkinkan mereka mampu mengelola sumber daya dan mengeksploitasi hasil dari perekonomian yang ada di daerah Aceh. Hal ini mencakup penanaman tanaman seperti kopi, tembakau, serta penguasaan terhadap perdagangan. Politik kolonial Belanda di daerah Aceh bisa menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan dampak jangka panjang terhadap masyarakat Aceh (Ramli, 2022).

Sebelum kedatangan Islam di Aceh, Aceh dikenal sebagai kerajaan Hindhu Budha yang dikenal dengan nama “Lamuri” dan “Lamuri Sukanda”. Islam mulai masuk ke Aceh pada abad ke 13M dan ke 14M, yang dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia. Dan Aceh meenjadi salah satu pusat penyebaran Islam saat itu. Dan banyak ulama Aceh yang berperan dalam penyebaran Islam saat itu, salah satunya Sultan Iskandar Muda. Pada masa beliau lah Islam sampai pada puncak kejayaan dan memiliki pengaruh yang kuat.

Aceh merupakan salah satu daerah yang tidak berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Pada tahun 1873 Belanda menyerang daerah Aceh di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R Kohler. Padahal Aceh salah satu daerah merdeka yang tidak boleh dilanggar kedaulatannya. Belanda menguasai Aceh melalui Perang Aceh yang berlangsung pada abad ke 19. Perang tersebut mencakup serangkaian konflik seperti perang pertama (1873-1904) dan perang Aceh kedua (1873-1914) yaitu Aceh menghadapi perlawanan sengit dari penduduk setempat.

Peradaban Aceh saat ini masih belum bergerak aktif untuk keluar dari keadaan kritis. Hampir semua sejarah abad 17 dihadapi dengan konflik atau tragedi berdarah yang selalu menjadikan manusia sebagai aktor utama dalam konflik. Namun, proses untuk mengulang kembali peradaban Aceh selalu mengalami kegagalan. Setelah abad 17 Aceh mulai memikirkan cara berpikir yang tidak lagi menyatu dengan siapak antusiasme pada Aceh. Akibatnya, ketika antusiasme terhadap Aceh tidak lagi muncul, maka dengan sangat mudah Aceh ditaklukkan (Cibro, 2018). Walaupun secara fisik itu Aceh tidak pernah berhasil dikalahkan oleh penjajahan. Namun secara mental, Aceh itu kehilangan sumbu kesadaran dalam peradaban. Dalam hal ini, penulis akan mencoba membahas bagaimana kebijakan politik kolonial belanda terhadap Aceh (Bustamam, 2019).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis memakai metode *Library Research* dengan pendekatan Heuristik. Heuristik yaitu Tahap mencari, menemukan, dan

mengumpulkan sumber juga data yang relevan dengan topik penelitian untuk mengetahui beberapa peristiwa di masa lalu. Pada tahap ini, biasanya para sejarawan akan mengunjungi situs budaya, wawancara pada pelaku atau saksi sejarah, dan mencari buku yang relevan (Herlina, 2020).

Pembahasan/hasil

A. Sejarah Kolonialisme Belanda di Aceh

Aceh dan Belanda pertama sekali terjalin relasi antar negara pada tanggal 21 Juni 1599, ketika dua kapal pedagang dari Belanda dan saudaranya Frederick tiba di pelabuhan ibu kota kerajaan Aceh dibawah pimpinan Cornelis de Houtman (Basri, 2022). Awalnya kedatangan kapal Belanda disambut baik oleh Sultan Aceh (Sultan Alauddin Riayat Syah Al Mukkamal 1588-1604). Sultan berprasangka baik jika kehadiran para pedagang Belanda di Aceh dapat menguntungkan Aceh dengan bertambahnya hasil-hasil bumi seperti lada dan rempah lainnya semakin meningkat. Sultanpun bersikap dan bertindak sangat baik dengan memberikan kemudahan dan kebebasan kepada para pedagang Belanda untuk membeli lada dari ibu kota kerajaan Aceh (Elvira, 2018).

Sejalan dengan perkembangannya, pedagang Portugis yang sedang berada di ibu kota kerajaan Aceh menghasutan Sultan Aceh yang dilakukan agar Sultan tidak senang terhadap para pedagang Belanda (Cibro, 2021). Sehingga berakibat ketidakharmonisan hubungan antara pedagang Belanda dengan pihak Aceh. Hasutan ini dilakukan oleh orang portugis (sekarang dibagi menjadi dua negara, yaitu Portugal dan Spanyol) karena mereka itu tidak senang terhadap kehadiran pedagang-pedagang Belanda di Aceh yang dianggap sebagai saingannya. Cornelis De Houtman yang menjadi pemimpin Belanda bersama dengan anak buahnya terbunuh, mereka yang selamat dan saudaranya Fredrick De Houtman ditahan oleh pihak Aceh (Misri A. Muchsin, 2019).

Pada 2 Maret 1873 Cidatel Van Antwerpen diikuti oleh kapal Siak Nieuwenhuyzen dan Batawi melewati Singapura dan pulau Pinang dengan ditambah dua kapal perang menuju ke Aceh. Ketika mereka sampai ke perairan kerajaan Aceh, mereka meminta penjelasan secara tertulis kepada Sultan Aceh mengenai perbuatan utusan pemerintahan Aceh yang mengadakan hubungan dengan wakil negara asing (Amerika) di Singapura untuk meminta bantuan untuk melawan Belanda. Belanda menganggap bentuk pelanggaran terhadap bunyi perjanjian perdamaian antara Aceh dan Belanda (Misri A. Muchsin, 2019).

Pihak Belanda merasa tidak puas dengan jawaban dari Sultan Aceh, Nieuwenhuyzen memberi peringatan untuk mengambil tindakan yang tepat dan meminta kerajaan Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda (Reid, 2005). Tetapi jawaban Sultan Aceh tidak berisi pengakuan yang Belanda

inginkan. Oleh karena itu, Nieuwenhuyzen menyampaikan pernyataan bahwa perang pada tanggal 26 Maret 1873 kepada kerajaan Aceh. Pada 5 April Belanda sudah siap siaga di perairan Aceh dengan enam buah kapal uap, dua kapal angkatan laut, lima kapal layar. Pada 8 April pasukan Belanda mendarat di pantai Kuta Ceuremen, sebelah timur Ule Lheue dengan kekuatan 168 orang perwira dan 3198 bawahan, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal J. H. R Kohler.

Belanda mengirim pasukan lebih banyak lagi yang dipimpin oleh Jenderal Van Swieten dan ia berhasil menguasai Aceh. Sejak itulah Belanda mulai menjajah Aceh dengan tujuan (Misri A. Muchsin, 2019):

Pertama, Belanda ingin merebut kedaulatan kerajaan Aceh, sehingga pada 26 Maret 1873 Belanda memberitahukan Aceh bahwa akan perang dengan Aceh. Alasan Belanda ingin memerangi Aceh karena Aceh melanggar perjanjian Niaga yang dibuat pada 30 Maret 1857 dengan pemerintah Hindia Belanda.

Kedua, yaitu sebagai salah satu faktor penyebab Belanda semakin ingin untuk menguasai Aceh yaitu dengan dibukanya Suez pada tahun 1869M. pembukaan terusan Suez mengakibatkan dunia mengalami perubahan besar, terutama di bidang politik. Belanda semakin khawatir karena akan memungkinkan Aceh itu jatuh kepada salah satu negara Barat lainnya.

Perang Aceh bagi Belanda bukan sekedar kontak bersenjata, tetapi fokus pada politik nasional selama satu abad yang ditandai dengan jabatan waktu peralihan tempo dulu. Pada masa sebelum Belanda datang ke Aceh, Aceh merupakan sebuah kerajaan yang berdaulat, yaitu kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh seorang Sultan (Raja). Belanda datang ke Aceh ingin menjajah Aceh sekaligus sebagai misionaris. Namun, hasil alam yang sangat melimpah di Aceh maka Belanda ingin menguasai Aceh. Untuk tercapainya keinginan Belanda, mereka harus menempuh melalui perang kerajaan Aceh.

B. Kebijakan Politik Kolonial Belanda

Belanda adalah salah satu negara yang terletak di Eropa. Negara ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya, namun masih ingin mengambil keuntungan dari negara-negara lain. Salah satu daerah di Asia yang menjadi target Belanda adalah Aceh. Wilayah ini termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh pada masa itu. Dengan demikian, Belanda memiliki tujuan untuk menaklukkan rakyat Aceh. Untuk mencapai tujuannya, Belanda menggunakan berbagai upaya untuk menaklukkan rakyat Aceh. Pertama, Belanda membangun benteng-benteng di sekitar wilayah Aceh untuk menguasai daerah tersebut. Ini bertujuan untuk menghalangi rakyat Aceh dari memasuki daerah tersebut. Selain itu,

Belanda juga memasang pasukan tentara di daerah tersebut dan membangun sebuah pemukiman untuk mendukung usaha mereka (Anwar, 2020).

Belanda juga menggunakan berbagai macam cara untuk menaklukkan rakyat Aceh. Mereka menggunakan ancaman kekerasan, seperti perang dan ancaman untuk membunuh. Mereka juga menggunakan kekerasan fisik untuk mengendalikan rakyat Aceh dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut (Octaviani, 2020). Dalam hal ini, Belanda juga menggunakan berbagai macam teknik diplomasi untuk menaklukkan rakyat Aceh. Mereka menggunakan berbagai macam janji palsu dan tekanan politik untuk mencapai tujuan mereka. Belanda juga menggunakan berbagai macam cara untuk memecah belah rakyat Aceh dan menciptakan kerusuhan di daerah tersebut.

Upaya Belanda untuk menaklukkan rakyat Aceh tidak selalu berhasil. Rakyat Aceh banyak yang berjuang untuk melawan upaya Belanda. Banyak pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayah yang mereka miliki dan untuk menolak usaha Belanda untuk menaklukkan rakyat Aceh. Meskipun upaya Belanda untuk menaklukkan rakyat Aceh tidak berhasil, mereka masih berhasil menguasai wilayah tersebut selama lebih dari sepuluh tahun. Akhirnya, pada tahun 1904, Aceh berhasil mencapai kemerdekaan dari kekuasaan Belanda. Upaya Belanda untuk menaklukkan rakyat Aceh telah gagal dan mereka kehilangan hak istimewa mereka di wilayah Aceh (Siahaan et al., 2021).

Deklarasi perang kolonial Belanda terhadap Kerajaan Aceh dimulai ketika armada Belanda yang dipimpin dibawah pimpinan Edelaar Nieuwenhuyzen yang tiba di pelabuhan Kerajaan Aceh pada tanggal 23 Maret 1873 dengan membawa 3.200 tentara, 168 perwira yang dipimpin oleh Mayor Jenderal J. H. R. Kohler (Tahamrin Z, 2004). Nieuwenhuyzen mengirim sepucuk surat kepada Sultan Aceh yang berisi bahwa Belanda mengharapkan agar Sultan Aceh mau mengakui kedaulatan Belanda. Menerima surat tersebut maka Sultan mengadakan sidang kilat bersama dengan stafnya. Niuwehuyzen menerima balasan dari Sultan Kerajaan Aceh bahwa permintaanya ditolak. Maka pada tanggal 26 Maret 1873 pemerintahan Belanda mengumumkan ancaman pernyataan perang kepada Belanda terhadap Kerajaan Aceh (Hadi, 2010).

Perang antara Belanda dan Aceh bukan hanya melihat dari upaya mempertahankan sebuah negara. Perang tersebut Belanda bukan hanya ingin berusaha menaklukkan Aceh, melainkan ingin merebut hasil alam serta ingin mengkacaukan pemerintahan Aceh. Namun, perang Belanda yang gagal dalam menaklukkan Aceh kemudian mereka kembali ke Betavia (Tahamrin Z, 2004). Hal ini, mereka ingin melaporkan Gubernur Jenderal bahwa mereka mengalami kekalahan dalam perang Aceh.

Karena Belanda terus mengalami kekalahan berulang kali maka mereka memikirkan strategi baru untuk menaklukkan Aceh. Salah satu yang mereka tempuh yaitu dengan mengutus seorang ahli dalam berbagai ilmu dan ia mampu memanipulasi dan mengalahkan lawan. Dalam hal ini, hadirlah seorang yang diutus Belanda yang berpenampilan Islami dengan ciri-ciri tinggi, besar, berjenggot tebal, dan mengaku dirinya sebagai seorang Muslim di Belanda, Ia adalah Christaan Snouck Hurgronje (Juftazani, 2021).

Christaan Snouck Hurgronje dilahirkan pada tanggal 8 Februari 1857 di Costerhout Nederland. Ia menganut agama Nasrani sejak kecil, ia menempuh pendidikan di Universitas Leiden pada jurusan Theologi. Enam tahun kemudian ia mendapatkan gelar doktor. Pada saat menjadi mahasiswa Snouck mulai tertarik dengan Islam. Pada tahun 1885 Christaan Snouck Hurgronje memeluk agama Islam dan pergi ke Mekkah untuk belajar ilmu agama Islam (Sidik, 2020). Di Mekkah Snouck Hurgronje mendapatkan bimbingan serta arahan dari para ulama Mekkah untuk belajar agama Islam secara keseluruhan dan sempat belajar bahasa Melayu. Karena kemampuan berbahasa Arab dan pengetahuan yang luas tentang Islam, Snouck Hurgronje sering dikira sebagai seorang muslim. Lewat sebuah surat yang dikirim kepada temannya, Snouck Hurgronje mengaku bahwa dirinya berpura-pura masuk Islam.

Pada tahun 1893, Snouck Hurgronje dikirim ke Indonesia dan ditunjuk sebagai peneliti pendidikan Islam dan profesor Bahasa Arab di Batavia. Karena pengetahuannya tentang Islam begitu bagus dan kemampuan bahasanya sangat pandai serta pengalaman bergaul dengan orang-orang Aceh, ia dipandang sebagai orang yang tepat untuk diberi tanggung jawab dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Belanda dalam menaklukkan Aceh (Laffan, 2016).

Pada tahun 1891, Snouck Hurgronje ditugaskan oleh pemerintahan Belanda untuk meneliti wilayah Aceh dengan nama samaran Abdul Gaffar dan mempelajari adat istiadat, kebudayaan dan ajaran Islam masyarakat Aceh (Wensick, 1995). Tidak lama setelah ketibaannya di Aceh, Snouck Hurgronje menyiarkan agama Islam kepada rakyat Aceh, hal ini dibuktikan ketika shalat tiba ia bergabung dengan kaum Muslim untuk menunaikan shalat. Kemana yang ia pergi selalu membawa kitab kuning, bahkan sempat mengajarkan pemuda-pemuda Aceh yang ingin pintar dalam membaca kitab kuning. Ia juga sering menjadi imam ketika shalat. Ia pandai berbahasa Aceh dan bahasa Arab (Juftazani, 2021).

Snouck Hurgronje selalu berbincang-bincang dengan para ulama, dan ia dekat dengan ulama yang terkenal di Aceh. Dan ia mempelajari kehidupan serta pemerintahan yang ada di Aceh (Bus & Jhohar, 2015). Setelah ia mengetahui agama, politik, serta budaya yang ada di Aceh.

Menurut C. Snouck Hurgronje, rakyat Aceh yang beragama Islam tidak mungkin menyerah kepada Belanda, sebelum mereka diperlihatkan dengan kekerasan (Ahmad, 1982). Ia berhasil membaaur dengan penduduk setempat dan mendapatkan informasi tentang tata wilayah Aceh, posisi ulama dan kelemahan-kelemahan masyarakat Aceh. Pada tahun 1892 Lalu Snouck Hurgronje kembali ke Belanda, Snouck memberikan anjuran kepada pemerintahan Belanda untuk menghancurkan Aceh dengan cara perang yang dilandasi dengan agama, dan menurutnya perang ini mampu dimenangkan dengan mengandalkan kemampuan militer Belanda. Ia menulis sebuah laporan kepada pemerintahan Belanda yang berjudul *Atjeh Verslag*. Laporan yang ditulis Snouck Hougranje berisi saran-saran yang bertujuan untuk meredam perlawanan rakyat Aceh dengan cara menjalin hubungan baik dengan ulama, menghilangkan ketakutan rakyat Belanda terhadap pengaruh agama Islam, serta menggunakan taktik adu domba antara kelompok-kelompok masyarakat Aceh. Strategi yang kedua Belanda lakukan terhadap Aceh ialah penyanderaan. Yaitu upaya untuk menekankan para pejuang-pejuang Aceh untuk menyerah. Akhirnya, Belanda berhasil menyedera istri Sultan dan beberapa pinpinan Aceh, Belanda berhasil memaksa beberapa pemimpin untuk menyerah (Alfian, 1987). Namun, penyerahan diri Sultan bukan berarti mrngakhiri seluruh perjuangan masyarakat Aceh, karena masih ada beberapa ulama dan beberapa pemimpin lainnya terus melanjutkan perjuangan (Idi, 2019).

Disatu pihak, Belanda juga melakukan kebijakan *divide et impera* yang sering kita dengar dengan politik belah bambu Belanda memberi kebebasan bagi kaum *uleebalang* untuk urusan dan kepentingan pemerintahannya, dan pihak lain Belanda memerlukan kaum ulama. Dalam hal ini, *uleebalang* diberi jabatan yang tinggi serta kekuasaan yang penuh untuk mengatur sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik dan agama. Posisi ulama dalam urusan kemasyarakatan semakin tersingkirkan dan *uleebalang* memegang kekuasaan penuh dalam mengatur negerinya untuk menyingkirkan ulama. Maka hilanglah peran ulama dalam kesultanan Aceh yang perannya jauh berbeda dengan *uleebalang*. Snouck Hurgronje bukan hanya mendesak pemimpin Belanda untuk memimpin adat dan pemimpin agama di Aceh, serta antara ulama yang radikal maupun moderat.

Snouck Hurgronje mengusulkan niat baik kepada rakyat Aceh dengan mendirikan mesjid memperbaiki infrastruktur-infrastruktur yang seperti jalan, irigasi, serta memberikan bantuan berupa pekerjaan sosial rakyat Aceh. Ketika Belanda menghadapi perlawanan berat dari rakyat Aceh, Belanda menerapkan berbagai upaya. Upaya-upaya ini termasuk berusaha untuk membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan Aceh, mendekati orang Aceh yang berpengaruh, dan berupaya untuk menetapkan kerjasama komersial dengan kerajaan Aceh. Mereka menggunakan berbagai

macam janji palsu dan tekanan politik untuk mencapai tujuan mereka. Belanda juga menggunakan berbagai macam cara untuk memecah belah rakyat Aceh dan menciptakan kerusuhan di daerah tersebut. Belanda juga menggunakan kekerasan untuk menaklukkan rakyat Aceh. Pada tahun 1596, Belanda menyerang Aceh dengan pasukan yang terdiri dari 120 kapal dan 10.000 tentara. Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Aceh karena kekuatan militer mereka. Mereka menggunakan ancaman kekerasan, seperti perang dan ancaman untuk membunuh. Mereka juga menggunakan kekerasan fisik untuk mengendalikan rakyat Aceh dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Belanda membangun benteng-benteng di sekitar wilayah Aceh untuk menguasai daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghalangi rakyat Aceh dari memasuki daerah tersebut. Selain itu, Belanda juga memasang pasukan tentara di daerah tersebut dan membangun sebuah pemukiman untuk mendukung usaha mereka.

Kemudian, Belanda mencoba untuk menghancurkan ekonomi Aceh dengan menerapkan berbagai taktik. Mereka memotong semua hubungan ekonomi antara Aceh dan negara-negara lain, termasuk Portugis, India, dan Cina. Mereka juga mengatur monopoli pada produk-produk seperti kopi dan rempah-rempah. Ini membuat ekonomi Aceh semakin memburuk dan menyebabkan peningkatan kemiskinan (Efendi & Hadana, 2022). Selain itu, Belanda juga menerapkan berbagai taktik militer untuk menaklukkan Aceh. Belanda menarik tentara dari berbagai lokasi, menggunakan pasukan kavaleri, dan menerapkan strategi-strategi untuk menghancurkan kekuatan militer Aceh. Belanda mengirim armada yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk menyerang rakyat Aceh pada 1599. Armada Belanda menyerang dengan kekuatan militer dan menyebarkan kepanikan di wilayah Aceh. Mereka juga meningkatkan kontrol mereka terhadap lautan di sekitar Pulau Sumatera, sehingga membuat rakyat Aceh tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan Belanda. Setelah itu, Belanda mengirim pasukan lain untuk menegaskan kekuasaan mereka di Aceh. Pada 1603, Belanda mengirim pasukan yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen untuk menaklukkan rakyat Aceh. Pasukan Belanda menyerang dengan kekuatan militer dan menguasai wilayah Aceh. Mereka juga mengubah sistem pemerintahan dan hukum Aceh untuk menyesuaikan dengan kepentingan Belanda.

Selain itu, Belanda juga menyerang rakyat Aceh dengan cara yang lebih halus. Mereka mengirim misi-misi ke Aceh untuk memberikan pelajaran agama Kristen dan membuka sekolah-sekolah untuk mendidik dan membangun budaya baru di Aceh. Dengan cara ini, Belanda berusaha untuk mengubah pandangan rakyat Aceh dan mengendalikan kekuasaan mereka. Belanda juga menggunakan tekanan ekonomi untuk memperkuat

kekuasaannya di Aceh. Mereka mengirim pedagang-pedagang Belanda ke Aceh untuk membuka toko-toko dan mengambil keuntungan dari perekonomian Aceh (Mandasari, 2020). Dengan cara ini, Belanda berhasil mengambil keuntungan dari rakyat Aceh dan mengendalikan wilayah Aceh hingga akhir abad ke-19. Dengan demikian, upaya Belanda untuk menaklukkan rakyat Aceh dapat dilihat dengan jelas. Belanda menggunakan kekuatan militer, kebijakan pemerintahan, dan tekanan ekonomi untuk mengambil keuntungan dari rakyat Aceh dan memperkuat kekuasaannya di wilayah Aceh. Meskipun upaya Belanda kadang-kadang terasa tidak adil, tetapi ini merupakan salah satu cara yang digunakan Belanda untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari negara-negara lain. Mereka juga menggunakan berbagai senjata dan teknologi untuk mengalahkan pasukan Aceh. Lalu Belanda mencoba untuk melemahkan kekuatan politik Aceh dengan memecah kerajaannya menjadi beberapa wilayah kecil yang berbeda. Hal ini membuat rakyat Aceh lebih mudah dikontrol dan diperintah oleh Belanda.

Dari berbagai kebijakan, Belanda berhasil menaklukkan rakyat Aceh pada akhir abad ke-16. Belanda menjadi penguasa atas Aceh, sampai pada tahun 1942, ketika Jepang menyerang Aceh. Setelah Perang Dunia II, Belanda kembali menguasai Aceh. Namun, pada tahun 1950, Belanda menyerahkan Aceh kepada Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Aceh merupakan salah satu wilayah yang tidak berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Belanda mencoba menguasai Aceh sejak abad ke 17 dengan berbagai kebijakan yang Belanda terapkan kepada Aceh. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut dapat dipatahkan dengan perlawanan pejuang-pejuang Aceh.

Belanda mencoba menaklukkan Aceh dengan berbagai kebijakan diantaranya dengan menanamkan kebijakan politik di wilayah Aceh. Setelah perang Aceh politik Aceh sangat terganggu, disitulah kesempatan Belanda untuk mencoba merusak politik aceh dengan cara megutuskan Snouck Hougranje sebagai propaganda dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada rakyat Aceh. Selain itu Belanda juga melakukan kebijakan *divide et impera* dikenal dengan politik belah bambu. Belanda memanfaatkan sumber daya alam Aceh untuk kepentingan mereka mendirikan perusahaan-perusahaan pembangunan dan perkebunan yang dikuasai oleh Belanda. Lalu Belanda juga mencoba untuk mengubah budaya serta pendidikan Aceh, mereka berusaha mendirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum Belanda dan mempromosikan budaya Belanda.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Z. (1982). *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imprealisme di Daerah Aceh*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Alfian, I. (1987). *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*. Pustaka Sinar Harapan.
- Anwar, A. (2020). Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam. *Jurnal Adabiya*, 19(1), 13–28. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v19i1.7482>
- Basri, H. H. (2022). *Konfigurasi Sosial-Intelektual & Horizon Politik A. Hasjmy*. Ar-Raniry Press.
- Bustamam, K. (2019). *Acehnologi* (Vol. 3). Bandar Publishing.
- Bus, Y., & Jhohar, I. (2015). *Pengaruh “Dinamika Sosial Politik” Muslim di Hindia-Belanda Terhadap Regulasi Ibadah Haji Oleh Pemerintah Kolonial Belanda*. Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang.
- Cibro, R. (2018). Dari Islam Politik Ke Acehnologi Biografi Pemikiran Kamaruzzaman Bustamam- Ahmad. *At-Taḥkīr*, 11(2), 18–39. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.733>
- Cibro, R. (2021). Epistemologi Tasawuf Hamzah Fansuri dalam Kitab Sharb Al-Ashiqin. *At-Taḥkīr*, 14(2), 134–149. <https://doi.org/10.32505/at.v14i2.1936>
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law and Social Development in Aceh. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 185–196. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Elvira, Z. (2018). *Ulee Lheue Dalam Perekonomian Maritim Aceh Masa Belanda (1973)*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Hadi, A. (2010). *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah Edisi Revisi*. Satya Historika.
- Idi, A. (2019). *Politik Etnisitas Hindia Belanda: Dilema Dalam Pengelolaan Keberagaman Etnis Di Indonesia*. Kencana.
- Juftazani. (2021). *The Atjeh Oordolog 1873-1890*. Nuansa Cendikia.
- Laffan, M. (2016). *Sejarah Islam di Nusantara*. Bentang Pustaka.

- Mandasari, C. M. (2020). *Strategi Pertahanan Belanda Di Kutaraja (1884-1898)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Miftakhuddin. (2019). *Kolonialisme, Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni*. CV Jejak.
- Misri A. Muchsin. (2019). *Trumon Sebagai Kerajaan Berdaulat dan Perlawanan Terhadap Kolonial Belanda di Barat-Selatan Aceh*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
- Mustofa, A. A. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Octaviani, H. (2020). *Tipologi Masyarakat Aceh Pada Perang Aceh-Belanda 1873-1942*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ramli, R. (2022). Kontribusi Studi Kawasan Bagi Paradigma Keilmuan Acehnologi. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v13i1.683>
- Reid, A. (2005). *Asal mula konflik Aceh: dari perebutan pantai Timur Sumatra hingga akhir kerajaan Aceh abad ke-19*. Yayasan Obor Indonesia.
- Siahaan, S., Hendra, A., & Midhio, I. W. (2021). Strategi Perang Semesta dalam Perang Aceh (1873-1912). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2537–2548. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.517>
- Sidik, H. (2020). Christiaan Snouck Hurgronje Dalam Dinamika Islam di Aceh Pada Masa Kolonial Belanda. *Jurnal Artefak*, 7(1), 31–42. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3282>
- Tahamrin Z, H. M. (2004). *Aceh Melawan Penjajahan Belanda*. CV. Wahana.
- Wensick, A. J. (1995). *Christiaan Snouck Hurgronje*. INIS.